

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ana Nadia Abrar. 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- 1996. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- , 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bagir Manan. 2003. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bambang Waluyo. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Adhya Bakti.
- 1994. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan, Dalam: Masalah-Masalah Hukum*. Semarang: FH UNDIP, No. 4 Tahun 1994.
- Binoto Nadapdap. 2014. *Korupsi Belum Ada Matinya*. Jakarta: Permata Aksara.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta.
- 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. 2. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Etty Indriaty. 2014. *Pola dan Akar Korupsi, Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harun Alrasid. 1999. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hilman Hadikusuma. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Juniadi Soewartojo. 1998. *Korupsi, Pola Kegiatannya dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Koeswadi. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Cetakan I, Citra Aditya Bhakti.
- L & J Law Firm. 2009. *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2002. *Pembahasan Permasalahan KUHP dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- PAF. Lamintang. 1998. *Hukum Penitentier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Soesilo. 2003. *Tugas Kewajiban dan Kewenangan Penyidik, Jaksa, Hakim (Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP)*. Bandung: Sinar Grafika.
- Riant Nugroho. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Romli Atmasasmita. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Shant Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerdjono Dirdjodosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. 2000. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sukron Kamil. 2013. *Korupsi dan Integritas Dalam Ragam Perspektif*. Jakarta: Pusat Studi Indonesia-Arab-PSIA.
- Susan Rose-Ackerman. 2006. *Korupsi Pemerintahan, Sebab, Akibat dan Reformasi*. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- WJS. Poerwasunata. 2003. *Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

-----Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04. UM. 01. 06/1983.66 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

C. Jurnal/Artikel Internet

- Denny Kailimang, “Penangguhan Penahanan dengan Uang Jaminan Perlu Diperjelas”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/penangguhan-penahanan-dengan-uang-jaminan-perlu-diperjelas-hol13271?page=all>, tanggal akses 5 Desember 2023
- Faturohmanalbantani.co.id/2011/01-ciri-ciri-korupsi-sebab-dan-akibat-html. di download pada tanggal 2 September 2023 pukul 04.20 wib.
- Haryadi, “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3D%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufwC%26tzm%3D-420
- Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi”, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum*

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).

Hermawanto, “Penangguhan Penahanan dengan Uang Jaminan Perlu Diperjelas”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/penangguhan-penahanan-dengan-uang-jaminan-perlu-diperjelas-hol13271?page=all>, tanggal akses 5 Desember 2023

Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

Muhammad Farhat Abbas. Disertasi. *“Pengisian Jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945”*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran. Bandung, 2013.